

Pemko dan DPRD Kota Bukittinggi Tandatanganinya Nota Kesepakatan bersama KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026

Linda Sari - BUKITTINGGI.WARTAWAN.ORG

Nov 3, 2025 - 22:42



Pemko dan DPRD Kota Bukittinggi Tandatanganinya Nota Kesepakatan bersama KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD kota Bukittinggi tandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Bukittinggi, Senin, 3

November 2026.

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 pada 8 September 2025. Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS merupakan amanah peraturan perundang-undangan, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, yang menjadi dasar penyusunan APBD dan dibahas bersama antara Banggar DPRD dan TAPD. Proses pembahasan telah selesai dan dilaporkan dalam Rapat Gabungan Komisi serta Paripurna Internal pada 31 Oktober 2025.

Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Rahmi Brisma, menyampaikan, setelah melaksanakan pembahasan, APBD 2026, disepakati sebesar Rp 558,4 miliar, Pendapatan itu, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 161,8 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 396,6 miliar.

Untuk Belanja Daerah, ditetapkan sebesar Rp 734 miliar. Jumlah itu terdiri dari Belanja Operasi setelah pembahasan berjumlah sebesar Rp 669,9 miliar, Belanja Modal Rp 59,6 miliar. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sejumlah Rp 1.000.000.000 dan untuk Belanja Transfer untuk Tahun Anggaran 2026, dianggarkan sebesar Rp 3,50 miliar

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan APBD. Dokumen ini disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, serta memperhatikan target kinerja makro dan program daerah, selaras dengan pemutakhiran KEM-PPKF Tahun 2026.(**)